

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha saat ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan perhatiannya kepada lingkungan dan sosial. Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungannya. Perusahaan telah mengalami peningkatan tekanan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mencapai keberlanjutan dengan menjadi layak secara ekonomi dan bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Banyak perusahaan yang telah mengakui pentingnya memasukkan informasi non-keuangan, seperti pengungkapan keberlanjutan dalam laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) mereka untuk menunjukkan kontribusi mereka terhadap keberlanjutan (Aras & Crowther, 2009).

Pengungkapan *sustainability report* telah berkembang dan menjadi salah satu hal yang penting bagi setiap organisasi (Ernst & Young, 2013). *Sustainability report* menjadi media bagi perusahaan untuk menginformasikan kinerja organisasi dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungannya kepada seluruh pemangku kepentingan. Banyak organisasi sudah mulai beralih dari cara tradisional yang hanya melaporkan aspek keuangan, berubah ke arah yang lebih modern yakni melaporkan semua aspek, baik keuangan maupun non-keuangan (dimensi sosial dan lingkungan) kepada para *stakeholder*.

Menurut *Global Reporting Initiative* (2013) *sustainability report* adalah praktek pengukuran, pengungkapan, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal tentang kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Di dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas perusahaan. Aktivitas tersebut juga perlu dilaporkan melalui laporan tanggung jawab sosial yang disajikan dalam *annual report*, atau perusahaan dapat menyajikan laporan tanggung jawabnya melalui *sustainability report* sebagai laporan yang terpisah dari *annual report*. *Sustainability report* dapat dijadikan sebagai bentuk transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi dampak aktivitasnya.

Pada bulan April 2012 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perseroan. Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan melaporkan kegiatan tanggung jawab sosialnya. Pada penjelasan pasal 3 ditambahkan bahwa yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Perihal yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan

rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Perusahaan yang mempertimbangkan pengembangan yang berkelanjutan (*sustainable development*) akan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena dukungan yang diperoleh dari pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal seperti konsumen, karyawan, investor, pemerintah sebagai regulator, pemasok, maupun kelompok lainnya. Kemampuan perusahaan untuk mengkomunikasikan kegiatan dan kinerja sosial dan lingkungan secara efektif dalam *sustainability report* dinilai penting untuk keberhasilan jangka panjang, kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi (KPMG, 2008).

Di Indonesia, publikasi *sustainability report* masih bersifat *voluntary*, artinya perusahaan dengan sukarela menerbitkannya dan tidak ada aturan baku yang mewajibkan seperti halnya pada penerbitan laporan keuangan (Hasanah et al., 2006). Namun hal ini tidak mengurangi minat perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report*. Tuntutan masyarakat akan peran perusahaan dalam memberikan manfaat mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, akuntabel, serta praktik *corporate governance* yang semakin baik (Hasanah et al., 2006). Selain itu, mekanisme dan struktur *corporate governance* dapat dijadikan sebagai infrastruktur pendukung terhadap praktik dan pengungkapan *sustainability report* di Indonesia.

Penelitian sebelumnya telah menetapkan bahwa mekanisme *corporate governance* yang melibatkan sistem aturan, praktik, dan proses dimana

perusahaan diarahkan dan dikendalikan, memainkan peranan penting dalam kualitas pelaporan keberlanjutan dan kinerja keberlanjutan (Garcia-Torea et al., 2016; Gibson & O'Donovan, 2007; Kolk, 2008; Lau et al., 2016). Komposisi dewan (*board composition*) adalah bagian penting dari struktur *corporate governance* (Fama & Jensen, 1983). Komposisi dewan dalam suatu perusahaan memiliki dampak besar pada praktik dan prosedur pelaporan perusahaan (Keasey & Wright, 1993). Akibatnya banyak penelitian yang telah mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara komposisi dewan perusahaan dan kualitas pelaporan keberlanjutannya. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rao et al. (2012) mengenai hubungan antara pelaporan lingkungan dengan atribut *corporate governance*, yang menunjukkan bahwa *corporate governance* khususnya komposisi dewan memainkan peran penting dalam memastikan perusahaan memenuhi tujuan keberlanjutan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Post et al. (2011) yang mengevaluasi hubungan antara komposisi dewan dan *Environmental Corporate Social Responsibility* (ECSR), dan juga penelitian oleh Rupley et al. (2012) yang menguji hubungan aspek-aspek spesifik *governance* dengan kualitas pengungkapan lingkungan.

Diantara banyaknya penelitian yang dilakukan terkait komposisi dewan, hanya sedikit yang meneliti dampak dewan terhadap pelaporan keberlanjutan secara keseluruhan. Diantara studi yang ada, sebagian besar cenderung berfokus hanya pada aspek lingkungan dari keberlanjutan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial (Ong & Djajadikerta, 2018). Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang dampak komposisi dewan perusahaan yang merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting pada kualitas pelaporan

keberlanjutan secara keseluruhan maupun terhadap masing-masing aspek keberlanjutan dengan meninjau beberapa atribut komposisi dewan.

Penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* dengan menyelidiki hubungan antara pengungkapan keberlanjutan total, serta secara terpisah, yaitu tiga aspek pengungkapan keberlanjutan –ekonomi, sosial, dan lingkungan- dan proksi mekanisme *corporate governance* dengan berbagai atribut komposisi dewan. Penelitian ini mengadopsi indeks pelaporan keberlanjutan berbasis *Global Reporting Initiative* (GRI) yaitu *GRI Standards* untuk menilai pengungkapan dalam *sustainability report*.

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan data perusahaan-perusahaan yang beroperasi di bidang industri manufaktur dan penghasil bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Karena industri ini merupakan industri yang sensitif terhadap lingkungan dan berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam yang berhubungan erat dengan limbah dan pencemaran lingkungan sehingga memiliki tingkat risiko industri dan lingkungan yang tinggi. Tahun pengamatan pada penelitian ini menggunakan periode selama 4 tahun, yaitu tahun 2016 hingga 2019. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu proksi mekanisme *corporate governance* secara khusus oleh beberapa atribut komposisi dewan, yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan proporsi komisaris wanita dalam mendeteksi pengaruhnya terhadap pengungkapan *sustainability report*. Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan dapat menunjukkan hasil yang maksimal untuk mendeteksi adanya

pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

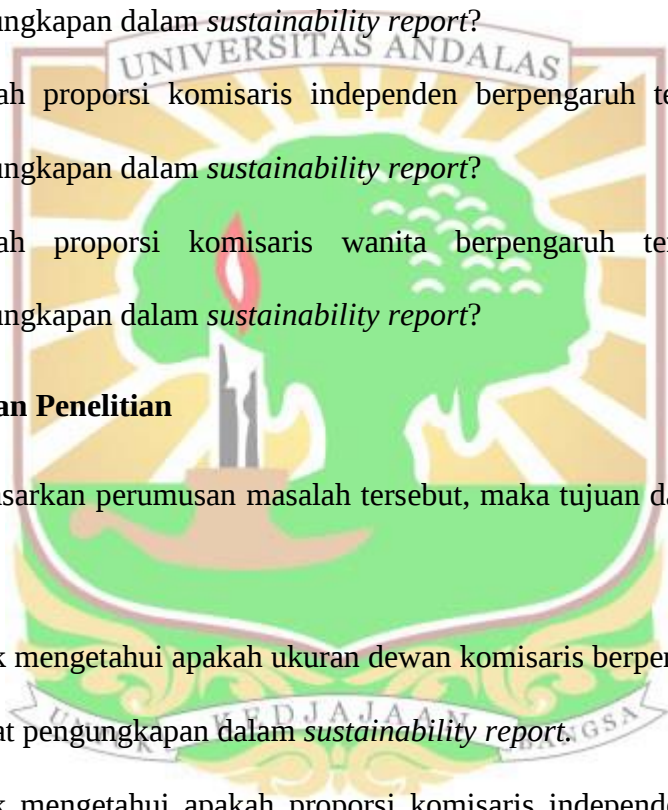
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam *sustainability report*?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam *sustainability report*?
3. Apakah proporsi komisaris wanita berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam *sustainability report*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam *sustainability report*.
2. Untuk mengetahui apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam *sustainability report*.
3. Untuk mengetahui apakah proporsi komisaris wanita berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam *sustainability report*.



1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyampaikan informasi dan masukan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya kepada para *stakeholder* sehingga tercipta *sustainability* perusahaan dan dapat mempublikasikan *sustainability report* sebagai bahan evaluasi dan sarana komunikasi kepada para *stakeholder*.
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan membantu investor untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi pada perusahaan yang memiliki potensi *sustainability* yang baik, sehingga tidak terpaku pada ukuran moneter saja.
3. Bagi pemerintah selaku regulator, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan referensi untuk menentukan dan mengatur mekanisme pengungkapan *sustainability report* yang lebih baik lagi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.
4. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi bagi para akademisi dalam mengembangkan penelitian di masa yang akan datang, serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber pemahaman khususnya di bidang akuntansi mengenai pengungkapan *sustainability report*.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara berurutan. Bab pertama yaitu pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Lalu bab kedua yaitu tinjauan pustaka yang memuat literatur yang digunakan sebagai landasan teori, penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan, kerangka pemikiran dalam penelitian, serta pengembangan hipotesis dari penelitian. Selanjutnya bab ketiga tentang metodologi penelitian yang menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan secara operasional, yang terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel penelitian, jenis dan sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan data yang digunakan, serta teknik analisis data dengan uji hipotesis. Kemudian bab keempat menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan mengenai objek penelitian, seluruh proses penelitian, teknik analisis data dan hasil dari pengujian sesuai dengan metode yang digunakan. Terakhir bab kelima menggambarkan keseluruhan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta keterbatasan penelitian, dan saran dari penelitian ini yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan.